

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Keputusan Presiden R.I. Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) atau yang saat ini dikategorikan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional yang mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Setjen Wantannas mengkoordinasikan dan menyiapkan rekomendasi sebagai saran kebijakan strategis dalam mengatasi permasalahan di bidang keamanan nasional pada khususnya, dan Ketahanan Nasional pada umumnya.

Adapun isu strategis yang diusung yaitu Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional. Isu strategis tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuh sub-isu strategis untuk periode lima tahun ke depan, yaitu: a) Permasalahan alutsista TNI dan Almitsus Polri dan pemberdayaan industri pertahanan; b) Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit, c) Profesionalisme Polri; d) Peralatan dan koordinasi intelijen; e) Gangguan keamanan wilayah perbatasan dan pelanggaran hukum dilaut; f) Prevalensi penyalahgunaan narkoba; dan g) Sistem keamanan nasional yang integratif.

Berdasarkan berbagai permasalahan, dan isu-isu strategis yang dihadapi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2015-2019, maka

Setjen Wantannas mempunyai tanggungjawab untuk sasaran bidang yang akan dicapai adalah terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi.

Pada tahun 2015, Setjen Wantannas melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pembinaan ketahanan nasional, yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga perumus kebijakan ketahanan nasional dalam menghasilkan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia melalui serangkaian kegiatan perumusan kebijakan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan. Berdasarkan tugas tersebut, Setjen Wantannas akan menjelaskan laporan kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015.

Pertanggungjawaban kinerja Setjen Wantannas Tahun 2015 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Setjen Wantannas Tahun 2015 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 1 dan 2 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban Sesjen Wantannas sebagai Sekretaris Dewan merangkap anggota Dewan Ketahanan Nasional dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 101 tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi :

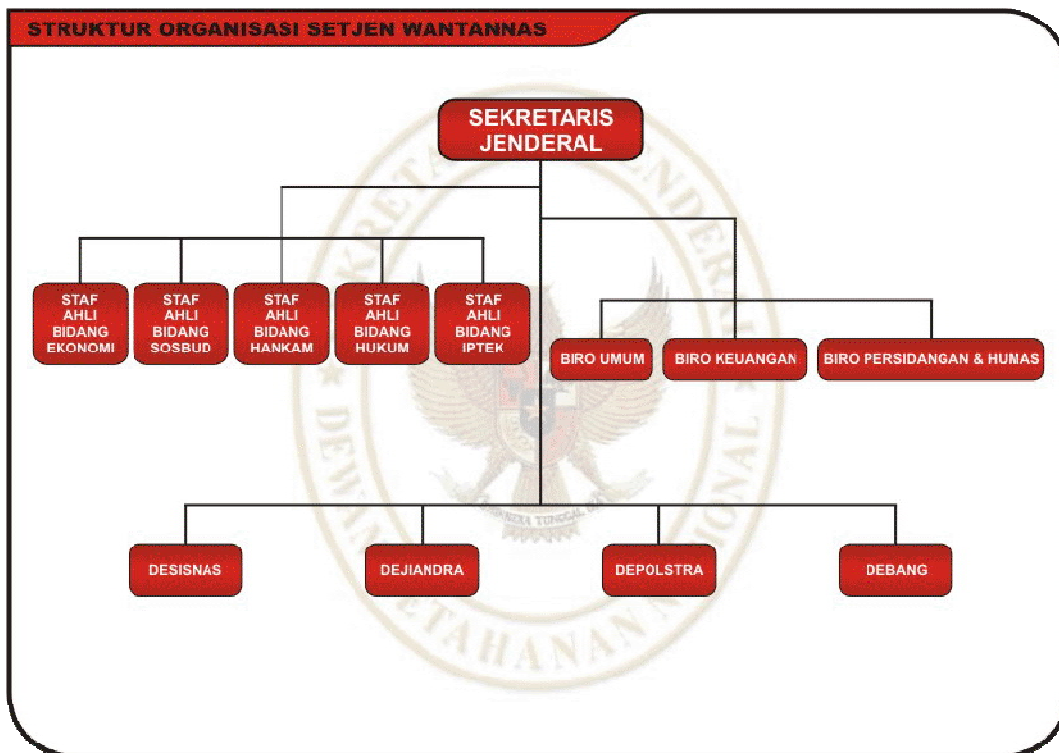
1. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
2. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara;
3. Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Setjen Wantannas dalam perkembangannya juga melaksanakan arahan/direktif dari Presiden selaku Ketua Wantannas yaitu pengelolaan secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien didukung oleh kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional masih harus ditingkatkan, melalui serangkaian kajian strategis. Materi kajian ditinjau dari segi *defence, security, crisis prevention, crisis resolution* dalam kerangka keamanan internal, keamanan eksternal dan bencana skala besar meliputi aspek politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan, agar lebih dapat dilaksanakan secara *operable, capable, implementable* yang sifatnya *action to be taken* dan komprehensif integral (lintas kementerian - lintas kewilayahan).

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Setjen Wantannas berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Setjen Wantannas adalah sebagai berikut:

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL



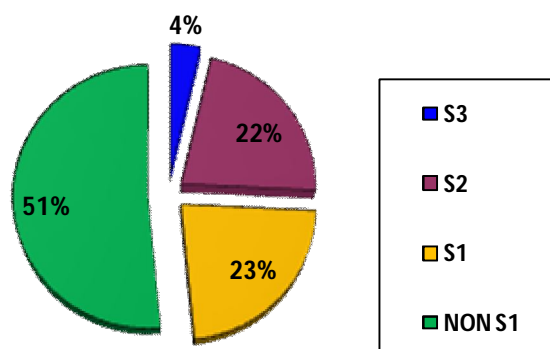
Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 4 unit kerja eselon I, yaitu: Kedeputusan Bidang Sistem Nasional; Kedeputusan Bidang Pengkajian dan Penginderaan; Kedeputusan Bidang Politik dan Strategi; dan Kedeputusan Bidang Pengembangan; serta terdiri dari 5 staf ahli yang dalam arsitektur kinerja Setjen Wantannas dirumuskan menjadi 1 unit kerja eselon I, yaitu terdiri dari Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan; Staf Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan, Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 3 unit kerja eselon II, yaitu Biro Umum; Biro Keuangan; dan Biro Persidangan dan Humas.

D. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas dan fungsi Setjen Wantannas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2015, kekuatan sumber daya manusia Setjen Wantannas adalah sebanyak 163 orang, terdiri atas 78 pegawai organik, 59 pegawai perbantuan, dan 26 pegawai diperbantukan. Dari sejumlah itu 6 orang (3,68%) di antaranya berpendidikan doktor; 36 orang (20,25%) master; 37 orang (20,86%) sarjana; 84 orang (55,21%) sarjana muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD sebagaimana

Gambar 1 dan Tabel 1. Dari pegawai tersebut 93 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 44 orang sebagai tenaga fungsional.

GAMBAR 2
GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Setjen Wantannas melaksanakannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat di antaranya diklat penjenjangan baik struktural dan diklat fungsional teknis yang sesuai dengan kebutuhan para tata usaha atau dalam menunjang kesekretariatan khususnya dalam bidang informasi teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.

TABEL 1.
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2015
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

NO	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		S3	S2	S1	Non S1	
1	Pejabat Negara	-	-	1	-	1
2	Eselon Ia	1	3	-	-	4
3	Eselon Ib	2	1	2	-	5
4	Eselon IIa	3	23	10	6	42
5	Eselon IIb	-	8	4	2	14
6	Eselon III	-	-	6	-	6
7	Eselon IV	-	1	8	12	21
8	Fungsional Umum	-	-	6	38	44
9	Pengemudi	-	-	-	10	10

NO	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		S3	S2	S1	Non S1	
10	Pengamanan Dalam	-	-	-	4	4
11	Tenaga Kebersihan	-	-	-	8	8
12	Pramusaji	-	-	-	4	4
	Jumlah Total	6	36	37	84	163

E. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2015, Setjen Wantannas mendapat alokasi pagu APBN sebesar Rp 144.307.962.000,- (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus enam dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis belanja, terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai : Rp 18.659.657.000,-
- 2) Belanja Barang : Rp 27.968.105.000,-
- 3) Belanja Modal : Rp 97.680.200.000,-

Jumlah : Rp 144.307.962.000,-

b. Berdasarkan jenis program :

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Wantannas: Rp 51.904.482.000,-

- a) Pengelolaan Perencanaan & Keuangan Rp 19.435.837.000,-
- b) Pengelolaan Persidangan & Humas Rp 470.555.000,-
- c) Pengelolaan Internal Perkantoran & Kepeg Rp 31.998.090.000,-

2) Program Pengembangan Kebijakan

Ketahanan Nasional: Rp 92.403.480.000,-

- a) Perumusan Kebijakan Sistem Nasional Rp 4.107.263.000,-
- b) Pengembangan Sisfo Wantannas Rp 72.910.000.000,-
- c) Perumusan Kebijakan Polstra Rp 5.137.289.000,-
- d) Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi & Resiko Pembangunan Rp 4.246.163.000,-
- e) Perumusan Pertimbangan & Saran Kebijakan Rp 1.877.508.000,-

F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Keputusan Presiden Nomor 101/1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2015 – 2019;
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: Kep-48/Sesjen/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2015;
 12. Surat Pengesahan DIPA Petikan Setjen Wantannas Nomor: SP DIPA-052.01-1.427975/2015 tanggal 14 Nopember 2015.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kerja Tahunan

RKT Setjen Wantannas tahun 2015 merupakan implementasi dari 6 (enam) strategi kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan sistem keamanan yang komprehensif.
2. Peningkatan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.
3. Peningkatan pembinaan ketahanan nasional melalui komunikasi dan informasi kepada masyarakat.
4. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
5. Meningkatkan kapasitas SDM Setjen Wantannas secara lebih proporsional dan akuntabel.
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Setjen Wantannas.

Berdasarkan strategi kebijakan tersebut diatas maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setjen Wantannas tahun 2015 sesuai Rencana Strategis (Renstra) Setjen Wantannas 2015-2019 ditetapkan sebagaimana tabel 2 berikut.

TABEL 2.
RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2015

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
----	--------	---------	-----------

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi guna merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan dan ancaman terhadap kedaulatan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan keselamatan bangsa dan negara;	Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan.	Indeks ketahanan nasional
2	Terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.	Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks kesehatan organisasi

RKT Setjen Wantannas tahun 2015 diatas dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional sebagai program utama dan didukung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas. Selanjutnya kedua program tersebut dijabarkan kedalam 9 (sembilan) kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Kedepuitan maupun Kebiroan di lingkungan Setjen Wantannas, sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Sistem Nasional
2. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas
3. Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi
4. Perumusan Kebijakan Penginderaan dan Perkiraan Ancaman
5. Perumusan Kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan
6. Perumusan Pertimbangan dan Saran Kebijakan
7. Pengelolaan perencanaan dan keuangan.
8. Pengelolaan persidangan dan kehumasan.
9. Pengelolaan internal perkantoran dan kepegawaian.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan RKT tahun 2015 telah disusun perjanjian kinerja di lingkungan Setjen Wantannas yang secara umum dapat diringkas sebagai berikut :

1. Perjanjian kinerja yang dimaksudkan untuk menguatkan kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui perumusan kebijakan dan strategi sistem nasional, politik dan strategi nasional, penginderaan dan perkiraan ancaman, serta evaluasi pembangunan dan pemecahan krisis. Kebijakan dan strategi dimaksud berupa saran tindak kepada Presiden selaku Ketua Wantannas
2. Perjanjian kinerja yang berkaitan dengan upaya penyediaan informasi keamanan nasional secara cepat, akurat, aman dan mutakhir. Informasi dimaksud berupa *policy brief* yang disampaikan kepada Presiden selaku Ketua Wantannas.
3. Perjanjian kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, keuangan, dan belanja pegawai agar semakin efektif dan efisien.
4. Perjanjian kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola persidangan dan kehumasan agar semakin efektif dan efisien, serta untuk terselenggaranya sistem teknologi dan informasi yang handal dan mutakhir.
5. Perjanjian kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola administrasi umum, perlengkapan dan operasional perkantoran agar semakin efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM, organisasi dan ketatalaksanaan DKN.
6. Perjanjian kinerja untuk meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan pengawasan internal dan program reformasi birokrasi.

Perjanjian-perjanjian kinerja di atas bermuara pada pencapaian sasaran strategis : (a) terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan; dan (b) terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien. Kedua sasaran strategis tersebut diukur dengan indeks ketahanan nasional dan indeks kesehatan organisasi.

Untuk mencapai target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian kinerja di atas didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp144.307.962.000,- (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh juta

sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam DIPA No ... Tahun 2015.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Dalam bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja Setjen Wantannas Tahun 2015 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Setjen Wantannas 2015-2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Setjen Wantannas menetapkan 2 tujuan yang akan dicapai untuk tahun 2015 adalah:

1. Terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi guna merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan dan ancaman terhadap kedaulatan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan keselamatan bangsa dan negara;
2. Terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.

Dari tujuan tersebut merupakan gambaran keberhasilan atas pencapaian kinerja Setjen Wantannas sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menghasilkan rumusan kebijakan dan strategi nasional sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden. Kedua tujuan tersebut telah ditetapkan target kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran strategis Setjen Wantannas untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

TABEL 5.
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan,	Indeks ketahanan nasional	80	80	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan				
Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks kesehatan organisasi	80	80	100

B. Analisis dan Evaluasi Atas Pencapaian Kinerja

1. Tujuan 1: Terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi guna merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan dan ancaman terhadap kedaulatan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional dan keselamatan bangsa dan negara;

Sesuai dengan indikator kinerja tahun 2015, Setjen Wantannas melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perumus kebijakan ketahanan nasional, **telah menghasilkan saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang *defence, security, crisis prevention and resolution* secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden RI)**, dan telah mendapatkan respon presiden berupa disposisi kepada kementerian/lembaga terkait.

Naskah saran tindak kebijakan ketahanan nasional dimaksud adalah naskah yang bersifat siklis, dinamis, dan perkiraan cepat. Naskah siklis yang dihasilkan pada tahun 2015 terdiri dari Apresiasi Strategi Nasional 2016 (Apstranas), Perkiraan Strategi Nasional 2016 (Kistranas), Rencana Kontijensi Nasional 2016 (Renkonnas), dan Telaahan Strategis Nasional (Telstranas) 2015-2019. Sementara itu naskah dinamis yang dihasilkan pada tahun 2015 adalah naskah kajian berupa saran tindak pemecahan masalah krusial mendesak dengan fokus pada permasalahan nasional yang strategis. Sedangkan naskah perkiraan cepat yang dihasilkan pada tahun 2015 adalah naskah kajian berupa saran tindak pemecahan masalah dengan

fokus pada permasalahan nasional strategis yang diperkirakan dapat berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan apabila tidak cepat dilakukan langkah penanganannya.

Naskah kajian yang bersifat siklis dan dinamis selama tahun 2015 tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau proses perumusan yang dimulai dari Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Rapat Kerja Terbatas (Rakertas), Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus), Rapat Perumusan Materi (Ramusmat) serta rapat-rapat lainnya. Disamping itu, kajian yang bersifat perkiraan cepat dilakukan melalui pandangan terhadap terjadinya dinamika kehidupan nasional yang memerlukan penanganan segera berupa saran tindak kepada Ketua Wantannas (yaitu Presiden R.I.) atau turun langsung ke lapangan, baik wilayah dalam negeri atau disebut Kajian Daerah (Kajida) maupun wilayah luar negeri atau disebut Kajian Luar Negeri (Kajilu), serta dan Rapat Kelompok Kerja (Pokja) yang kesemuanya melibatkan para pakar di bidangnya. Para pakar atau disebut narasumber meliputi tiga jalur kepakaran yaitu jalur praktisi, akademisi maupun birokrasi. Selanjutnya naskah kajian tahun 2015 tersebut dilaporkan ke Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai rekomendasi kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.

Pencapaian atas tujuan pertama ini, menjelaskan Setjen Wantannas berkomitmen meredefinisi konsep keamanan nasional baik pada aspek hukum maupun institusionalnya, pada hakikatnya bidang keamanan nasional masih harus ditingkatkan. Reformasi Sektor Keamanan (RSK) dilakukan dengan meninjau kembali kewenangan bidang ketahanan (*external defence*) dan keamanan (*internal security*) serta menata ulang aparatur negara yang terkait, lengkap dengan berbagai perangkat legal yang baru. Dalam konteks RSK, berbagai reformasi terus dijalankan mulai dari sektor militer, kepolisian, intelijen, hingga hukum agar dapat menjalankan fungsi masing-masing secara profesional dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Indonesia juga secara bertahap mengadopsi konsep keamanan insani (*human security*). Keamanan tidak lagi direduksi menjadi keamanan negara dan dimonopoli oleh aparat tertentu, namun keamanan nasional kini bersifat lebih komprehensif misalnya mencakup keamanan pangan dan energi. Dengan

demikian, keamanan nasional juga menjadi semakin partisipatif karena melibatkan berbagai institusi.

Dalam tingkatan keamanan nasional, munculnya potensi ancaman yang semakin variatif, memerlukan pengelolaan secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Pembagian penanganan permasalahan yang belum tuntas dan terbatasnya kerja sama antarinstansi menyebabkan koordinasi terkait keamanan nasional terkesan silo (kurangnya komunikasi dan tujuan bersama antar instansi), dimana tiap instansi bertindak sendiri-sendiri. Permasalahan ini bermula pada kebutuhan adanya lembaga semacam Dewan Keamanan Nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional yang terintegrasi. Munculnya kebijakan pengintegrasian/penyerasian keamanan nasional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional baik secara kelembagaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi maupun dalam sinerginya dengan lembaga keamanan nasional yang lainnya. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan pertahanan dan keamanan merupakan prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan nasional bidang lainnya. Terwujudnya penguatan kondisi ketahanan nasional dan keamanan nasional dalam negeri akan berdampak positif pada terselenggaranya pembangunan nasional lainnya secara aman dan lancar. Jika terjadi gangguan terhadap kondisi ketahanan nasional, tentunya juga akan mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional lainnya.

Untuk mengetahui hasil pengukuran kualitas naskah saran tindak kebijakan ketahanan nasional periode tahun 2015 telah ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam strategi dan tujuan yang pertama. Indikator tersebut diharapkan dapat menjelaskan pencapaian kinerja sasaran strategis Setjen Wantannas dalam melakukan perumusan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia sehingga diharapkan peran Setjen Wantannas dapat mendorong pencapaian tujuan, menjamin kepentingan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IKU yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2015 dan telah dicapai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

Indikator: Indeks ketahanan nasional adalah gambaran pencapaian kinerja Wantannas berdasarkan analisis hasil pencapaian sasaran program pengembangan kebijakan ketahanan nasional dihadapkan pada kondisi keamanan nasional telah tercapai sebesar 80% dari target 80% yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran program pengembangan kebijakan ketahanan nasional, diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan.
- b. Persentase respon Presiden R.I. terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden R.I. telah tercapai sebesar 80% dari target 80% yang telah ditetapkan.

Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian masing-masing indikator kinerja tersebut diatas sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan pertama sebagai berikut:

Capaian kinerja pembinaan ketahanan nasional telah ditetapkan dirumuskan dengan indeks ketahanan nasional dengan agregat capaian 1 sampai dengan 100. Secara substansi Pengertian Ketahanan Nasional adalah pengertian yang berkaitan dengan Ketahanan Nasional sebagai kondisi serta pengertian Ketahanan Nasional sebagai konsepsi. Sebagai kondisi, Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, ke berlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Dalam pengertian di atas, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan.

Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus-menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi

berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.

Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohaniyah, dan jasmaniah.

Sementara itu, keamanan adalah kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar dan dari dalam. Ketahanan nasional meliputi segenap bidang kehidupan yang dipetakan menjadi delapan gatra, yaitu: geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam sebagai gatra alamiah (*natural determinants*) serta ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan sebagai gatra sosial (*social determinants*). Dilihat dari perannya, ketahanan nasional dapat diposisikan sebagai sebuah konsepsi dan kondisi. Sebagai sebuah konsepsi, ketahanan nasional adalah gambaran menyeluruh dan terintegrasi dari komponen-komponen sistem nasional yang digerakkan menuju pencapaian tujuan nasional. Sebagai sebuah kondisi, ketahanan nasional adalah tolok ukur keberhasilan pengelolaan sistem nasional dalam mensinergikan seluruh kekuatan dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Capaian kinerja pembinaan ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan berbasis pada aspek ipoleksosbudhankam yang masing-masing dijabarkan ke dalam variabel dan

indikator. Selanjutnya, pada setiap indikator dirumuskan parameter, instrumen pengukuran serta formula untuk memperoleh indeks ketahanan dari indikator tersebut.

Indeks ketahanan dikategorikan mulai dari rawan (skor 1-20) , kurang tangguh (skor 21-40), cukup tangguh (skor 3-60), tangguh (skor 61-80), dan sangat tangguh (skor 81-100). Setiap indikator diberi bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan judgment pakar. Total bobot indikator dalam satu variabel berjumlah 100, total bobot variabel dalam satu aspek berjumlah 100, demikian juga total bobot aspek dalam ketahanan nasional berjumlah 100. Jumlah perkalian bobot indikator dengan indeks ketahanan indikator dalam suatu variabel menunjukkan indeks ketahanan variabel tersebut. Demikian seterusnya dengan menggunakan metode yang sama dapat dihitung indeks ketahanan pada setiap aspek dan indeks ketahanan nasional. Hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa selama tahun anggaran 2015 Indeks Ketahanan Nasional dapat dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 berikut:

TABEL 6
KONDISI KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2015
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Indikator	Target	Realisasi 2015	Capaian
Indeks ketahanan nasional	80	80	100%

Variabel yang diukur pada gatra ideologi meliputi variable kesetaraan akses, religiusitas dan toleransi. ketakwaan, kesamaan hak dalam konteks kewajiban sosial, solidaritas sosial, kesatuan wilayah, persatuan bangsa (nasionalisme) dan kekeluargaan, dengan ratusan indikatornya yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek lain selain aspek ideologi, seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Selain aspek ideologi yang menunjukkan indeks tangguh, berbagai variable pada aspek sosial budaya juga menunjukkan indeks tangguh. Beberapa variable dalam aspek sosial budaya yang mengkait dengan

praktek kerukunan sosial, ketertiban sosial, perilaku sosial, nilai tradisional dan universal dan kekeluargaan. Pada aspek pertahanan–keamanan variable yang mengkait dengan kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban, kondisi tertib dan tegaknya hukum, kondisi terselenggaranya perlindungan pelayanan, dan pengayoman masyarakat, kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban, sistem pertahanan semesta, bela negara dan resolusi konflik regional. Hampir sebagian besar dari variable-variabel aspek yang dipaparkan diatas menunjukkan kondisi ketahanan yang tangguh (skor 80) dan merupakan variable yang memiliki keterkaitan erat dengan outpun program pengembangan kebijakan ketahanan nasional. Korelasinya, semakin tercapainya target kinerja Setjen Wantannas, semakin tangguh indeks yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin tidak tercapainya target kinerja maka semakin kurang tangguh yang dihasilkan.

a. Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional

Capaian kinerja atas saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat (kirpat) bidang kebijakan ketahanan nasional sebagai salah satu indikator kinerja tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang *defence, security, crisis prevention and resolution* secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden R.I.) selama tahun 2015 Setjen Wantannas dapat dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 berikut:

**TABEL 7.
SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2015
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Indikator	Target	Realisasi 2015	Capaian	Realisasi	
				2014	2013
Kajian Siklis	3	3	100%	100%	100%
Kajian Dinamis	40	40	100%	115%	142%
Kajian Kirpat	84	84	100%	100%	100%
Kajian Semiloka	4	4	100%	100%	100%
Jumlah	131	131	100%	103%	110%

Jumlah Kajian Siklis dari target 3 naskah yang terdiri dari Apresiasi Strategi Nasional 2016 (Apstranas), Perkiraan Strategi Nasional 2016 (Kistranas), dan Rencana Kontijensi Nasional 2016 (Renkonnas), dapat direalisasikan sebanyak 3 naskah (100%), sehingga dapat direalisasikan keseluruhan target.

Jumlah Kajian Dinamis dari target 40 naskah yang terdiri dari kajian di bidang pertahanan (*security*), keamanan (*defence*), penanggulangan dan pencegahan krisis (*crisis prevention and resolution*) dapat dihasilkan sebanyak 40 naskah (100%), sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai seluruhnya.

Jumlah Kajian Perkiraan Cepat (Kirpat) yaitu suatu kajian yang bersifat segera/krusial mendesak dari target yang ditetapkan sebanyak 84 naskah dapat direalisasikan sebanyak 84 naskah (100%).

Jumlah Kajian Seminar/Lokakarya (Semiloka) yaitu suatu kajian terkait permasalahan khusus yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian masalah nasional dari target yang ditetapkan sebanyak 4 naskah dapat direalisasikan sebanyak 4 naskah (100%), sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai seluruhnya.

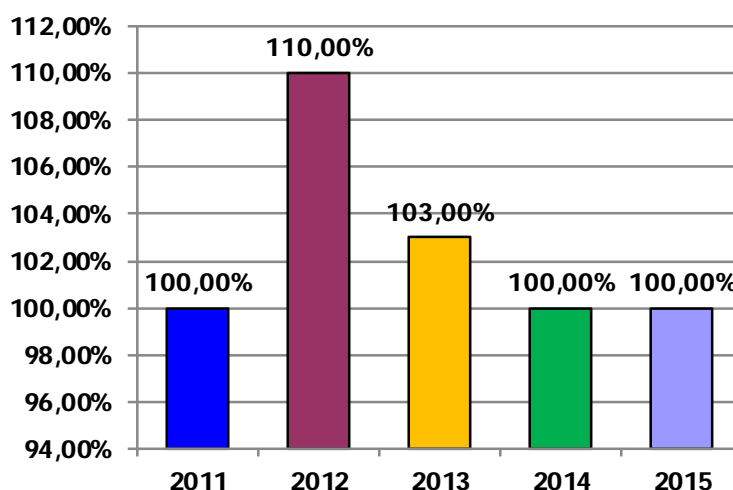
Dengan demikian persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis, kirpat, semiloka dan kajida bidang kebijakan ketahanan nasional yang ditargetkan 100% seluruhnya dapat diwujudkan ketercapaiannya.

Realisasi saran tindak hasil kajian Setjen Wantannas selama 5 (lima) tahun dari 2011 sampai 2015 menunjukkan konsistensi perbaikan capaian realisasi dari 100% di pada tahun 2011 dan tetap dapat dipertahankan konsistensi kenaikannya di tahun-tahun berikutnya. Persentase yang semula masih di bawah 100% adalah dalam indikator kajian Perkiraan Cepat dalam upaya menyusun alternatif solusi dan rekomendasi permasalahan yang krusial mendesak. Sedangkan kajian yang lain dapat dicapai sesuai target atau bahkan melebihi 100%. Secara faktual data tersaji sebagai berikut:

TABEL 8.
REALISASI SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2011 - 2015
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Indikator	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kajian Siklis	100%	100%	100%	100%	100%
Kajian Dinamis	115%	142%	115%	100%	100%
Kajian Kirpat	86%	100%	100%	100%	100%
Kajian Semiloka	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah	100%	110%	103%	100%	100%

GAMBAR 3.
GRAFIK REALISASI SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2011 - 2015



b. Persentase respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden R.I.

Respon Presiden R.I. adalah disposisi dari Presiden R.I. selaku Ketua Wantannas atas saran tindak dari Setjen Wantannas untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Persentase capaian kinerja atas respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden sebagai salah satu indikator kinerja tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang *defence, security, crisis prevention and resolution* secara komprehensif

sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden) tahun anggaran 2015 dapat dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Tabel 9 berikut:

TABEL 9.
RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK
HASIL KAJIAN TAHUN 2015
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Indikator	Target	Realisasi 2015	Capaian	Capaian	
				2014	2013
Kajian Siklis	80%	67%	84%	93%	100%
Kajian Dinamis	80%	85%	106%	100%	77%
Kajian Kirpat	80%	86%	108%	106%	78%
Kajian Semiloka	80%	100%	125%	125%	100%
Keseluruhan	80%	85%	106%	106%	88%

Persentase Kajian Siklis yaitu kajian yang diselenggarakan secara berlanjut sesuai periode waktu tertentu dan berjangka dari target mendapatkan respon Presiden sebesar 80% mendapat respon sebanyak 67%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian siklis pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 84%.

Persentase Kajian Dinamis dari target mendapatkan respon Presiden sebesar 80% yang terdiri dari kajian di bidang pertahanan (*security*), keamanan (*defence*), penanggulangan dan pencegahan krisis (*crisis prevention and resolution*) mendapat respon sebanyak 85%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian dinamis pecapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 106%.

Persentase Kajian Perkiraan Cepat (Kirpat) yaitu suatu kajian yang bersifat segera/krusial mendesak dari target mendapatkan respon Presiden yang ditetapkan sebanyak 80% diperoleh fakta bahwa mendapat respon sebanyak 86%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian kirpat pecapaiannya sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 108%.

Persentase Seminar/Lokakarya (Semiloka) yaitu suatu kajian terkait permasalahan khusus yang dilakukan kajiannya bersama berbagai Perguruan Tinggi di daerah dari target mendapatkan respon Presiden sebesar 80% mendapat respon sebanyak 100%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian semiloka pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 125%.

.Dengan demikian persentase keseluruhan saran tindak hasil kajian dinamis, siklis, kirpat, dan semiloka bidang kebijakan ketahanan nasional yang ditargetkan 80% mendapat respon sebanyak 85%. Dapat dikatakan bahwa kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan ketahanan nasional tahun 2015 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Dari hasil produk kajian yang berupa saran tindak dan saran kebijakan sebanyak 131 masukan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional ternyata dari hasil monitor, saran tindak yang direspon oleh Presiden sebanyak 111 masukan (85%). Hal ini karena saran tindak dan saran kebijakan yang disampaikan Setjen Wantannas kepada Presiden sebagian didisposisikan ke K/L terkait untuk ditindaklanjuti, dan sebagian lainnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan kenegaraan. Selisih persentase tersebut sebagai akibat tidak semua saran tindak merupakan konsumsi para K/L, melainkan juga internal masukan bagi Presiden R.I.

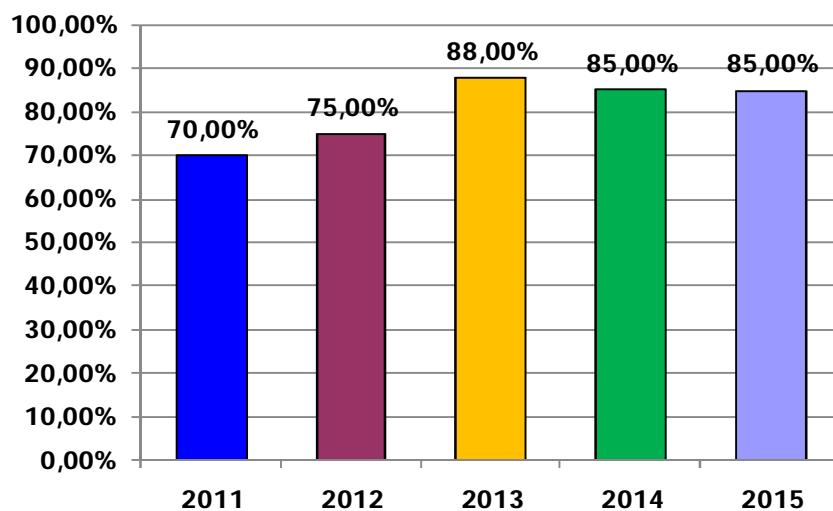
Realisasi respon Presiden atas saran tindak hasil kajian Setjen Wantannas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2011 sampai 2015 menunjukkan perbaikan realisasi yang signifikan dari 70% di awal pada tahun 2011 dan tercapai hingga 85% pada tahun 2015. Secara faktual data tersaji sebagai berikut:

TABEL 10.
RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK
HASIL KAJIAN TAHUN 2011 - 2015
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Indikator	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015

Indikator	Realisasi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kajian Siklis	70%	67%	100%	75%	67%
Kajian Dinamis	65%	70%	77%	80%	85%
Kajian Kirpat	75%	64%	78%	85%	86%
Kajian Semiloka	70%	100%	100%	100%	100%
Jumlah	70%	75%	88%	85%	85%

**GAMBAR 4.
GRAFIK RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK
HASIL KAJIAN TAHUN 2011 - 2015**



2. Tujuan 2: Terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien.

Tujuan kedua, menjelaskan kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien. Kapasitas kelembagaan dapat dinilai dari sumber daya yang ada sebagai penggerak organisasi, meliputi 5M (*men, money, materials, methods, and machines*). Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja. Dengan keterbatasan ketersediaan sumber daya baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya, maka Setjen Wantannas harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada

akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Capaian kinerja terwujudnya kapasitas kelembagaan Setjen Wantannas yang efektif dan efisien berbasis analisis pencapaian indikator kinerja program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya Wantannas. Selanjutnya, dirumuskan formula untuk memperoleh indeks kesehatan organisasi dari indikator tersebut. Setiap indikator diberi bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan judgment pakar. Total bobot indikator dalam satu variabel berjumlah 100, total bobot variabel dalam satu aspek berjumlah 100, demikian juga total bobot aspek dalam ketahanan nasional berjumlah 100. Jumlah perkalian bobot indikator dengan indeks ketahanan indikator dalam suatu variabel menunjukkan indeks kesehatan organisasi variabel tersebut. Demikian seterusnya dengan menggunakan metode yang sama dapat dihitung indeks kesehatan organisasi pada setiap aspek. Hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2015 Indeks Ketahanan Nasional dapat dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Tabel 9 berikut:

TABEL 11.
INDEKS KESEHATAN ORGANISASI TRIWULAN III TAHUN 2015
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Indikator	Target	Realisasi 2015	Capaian
Indeks kesehatan organisasi	80	80	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2015 dan telah dicapai hasil pengukuran kinerja bahwa Indeks kesehatan organisasi menggambarkan kinerja Wantannas berdasarkan analisis hasil pencapaian sasaran program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya Wantannas yang telah tercapai sebesar 80% dari target 80% yang telah ditetapkan.

Setjen Wantannas sebagai suatu Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat *techno structure* atau teknis semata, namun

juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*) masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Pelaksanaan pengembangan kapasitas seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas merupakan tujuan tambahan untuk dapat memberikan gambaran keberhasilan atas pelaksanaan tugas-tugas pendukung Setjen Wantannas tahun 2015 dengan sasaran strategis adalah terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas.

Untuk mengetahui hasil pengukuran terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas tahun 2015 telah ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagaimana sasaran strategis dan tujuan pertama. Kelima indikator tersebut diharapkan dapat menjelaskan pencapaian kinerja sasaran strategis Setjen Wantannas dalam melakukan pengembangan kapasitas seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas sehingga diharapkan mendukung pencapaian tupoksi Setjen Wantannas.

Sebagaimana Tabel 11, hasil pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan kedua Setjen Wantannas telah merealisasikan hasil capaian berdasarkan target rencana dalam penetapan kinerja tahun 2015. Adapun penjelasan hasil capaian pengukuran kinerja dari sasaran dan tujuan kedua untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Indikator pertama adalah opini BPK terhadap Laporan Keuangan Setjen Wantannas. Sebagai gambaran untuk Opini BPK atas laporan keuangan Setjen Wantannas yang diterima pada tahun 2015 adalah telah tercapai predikat WTP untuk laporan keuangan tahun 2014 dari target WTP yang telah ditetapkan.

Salah satu ukuran keberhasilan indikator lainnya dalam pencapaian peningkatan kapasitas seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas adalah adanya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Setjen Wantannas tahun 2014

berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2015 merupakan capaian kinerja tahun 2014. Prestasi ini menjadikan Setjen Wantannas sebagai Lembaga yang meraih opini WTP selama 8 (delapan) tahun berturut-turut (Laporan Keuangan tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua hal penting atas dampak hasil opini tersebut, yaitu: pertama, opini WTP dapat menggambarkan akuntabilitas institusi baik dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja, sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas dapat terjaga. Kedua, opini WTP merupakan wujud tercapainya salah satu kontrak kinerja yang sudah ditandatangani Sesjen Wantannas.

Prestasi opini tertinggi ini dicapai melalui kerja keras dan upaya perbaikan serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Setjen Wantannas, khususnya unit kerja Biro Keuangan sebagai Koordinator penyusunan laporan Keuangan Setjen Wantannas. Untuk mengukur pencapaian opini BPK atas Laporan Keuangan adalah melalui pemeriksaan oleh Auditor eksternal, yaitu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) secara rutin setiap tahun dengan menggunakan Metode Penilaian yang ditetapkan BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran dalam Metode BPK tersebut menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan audit keuangan dan audit kinerja. Dari hasil penilaian BPK tersebut telah dihasilkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Setjen Wantannas Tahun 2014.

Di samping itu, untuk menjaga kualitas (*quality assurance*) penyusunan laporan keuangan juga dilakukan *review* secara berkala (Semester dan Tahunan) oleh Tim Pengawas Internal atas penyiapan laporan Keuangan Setjen Wantannas serta pendampingan selama proses audit dalam mendorong rencana aksi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan (salah satunya penyelesaian temuan terkait pencatatan aset) sebagai pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi mempertahankan Opini Laporan Keuangan.

Tidak ada yang dapat menjamin bahwa opini WTP dari BPK dapat terus dicapai dan dipertahankan, tanpa adanya upaya yang sungguh-

sebenarnya dan nyata untuk terus melakukan perbaikan proses manajemen dan peningkatan mutu laporan keuangan serta menindaklanjuti temuan BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada. Pada tahun-tahun tercapainya opini WTP atas laporan keuangan Setjen Wantannas, telah dilaksanakan berbagai aktivitas untuk mendukung upaya mempertahankan opini WTP yang secara terus-menerus dan berlanjut dilakukan sampai dengan saat ini. Tahap-tahap aktivitas tersebut adalah sebagai berikut: (1) Identifikasi titik kritis/permasalahan yang akan menghambat pencapaian opini laporan keuangan “WTP”; (2) Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; (3) Monitoring dan evaluasi atas perbaikan; (4) Pelaksanaan *Quality Assurance* dan (5) Pendampingan atas pemeriksaan BPK.

- b. Indikator kedua adalah nilai hasil evaluasi KemenPAN&RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Nilai hasil evaluasi KemenPAN&RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas yang diterima tahun 2015 adalah CC untuk pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas tahun 2014 dari target CC yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas pada tahun 2015 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari menguatnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, yang ditandai dengan dilaksanakannya berbagai tahapan perencanaan strategis. Tahapan tersebut dimulai dari penetapan Rencana Kinerja Tahunan, baik tingkat lembaga maupun unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas, yang selanjutnya dibuat pernyataan kinerja oleh masing-masing pimpinan. Sebagaimana dalam Sistem AKIP, tahapan selanjutnya adalah pelaporan atas pengukuran kinerja oleh masing-masing pimpinan unit kerja telah dilaksanakan dengan baik, sehingga dalam penyusunan LKj (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) pada tingkat lembaga ini dapat dilaksanakan dengan baik dan obyektif.

Penilaian dari KemenPAN&RB merupakan salah satu indikator penilaian dari apa yang telah dicapai oleh Setjen Wantannas dalam melaksanakan kinerja selama tahun 2014. Penilaian ini dimulai dari aspek Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan oleh Setjen Wantannas

terhadap apa yang akan dilakukan selama tahun berjalan (2015) dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Di sisi lain, Renstra Setjen Wantannas 2015-2019 di dalamnya memuat indikator kinerja tujuan sebagai alat ukur keberhasilan organisasi, sebagai acuan rencana aksi pada tahun berjalan dituangkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan tidak hanya sebatas pada pencapaian target, namun juga mempertimbangan konsistensi indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, Renstra 2015-2019, Renja 2015, RKT 2015, dan Penetapan Kinerja 2015.

Implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Setjen Wantannas dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sebagai gambaran, pada tahun 2014 Setjen Wantannas telah menargetkan untuk memperoleh nilai “CC”. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2013/14 Setjen Wantannas mendapatkan predikat “CC” sesuai dengan target yang dikehendaki. Untuk itu momentum dari keberhasilan dalam pencapaian target pada tahun 2014 tersebut dapat menjadi pemicu semangat untuk memenuhi target yang akan datang, yakni peringkat capaian menjadi “B”.

- c. Indikator ketiga adalah persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan, yakni seluruh pejabat di lingkungan Wantannas telah menyerahkan LHKPN ke KPK.

Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara merupakan indikator yang ditetapkan sebagai salah satu pemicu keberhasilan kinerja Setjen Wantannas, karena dengan adanya pelaporan tersebut secara tidak langsung akan memperkuat sistem dan peningkatan kinerja untuk mempermudah pengawasan dalam hal KKN. Di samping itu, juga dalam rangka memenuhi permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para pejabat yang memegang jabatan strategis dan potensial/rawan KKN di lingkungan Setjen Wantannas.

Setjen Wantannas telah melaksanakan kewajiban menyerahkan LHKPN oleh seluruh pejabat Eselon I, Eselon II dan pejabat pengelola keuangan, sehingga dari target yang direncanakan 100% telah tercapai secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan komitmen pimpinan di lingkungan Setjen Wantannas khususnya dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Namun demikian dalam rangka menjaga dan menguatkan komitmen akan budaya anti korupsi, Setjen Wantannas secara konsisten melaksanakan program percepatan pencegahan pemberantasan korupsi pada tahun-tahun berikutnya yang meliputi kegiatan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK), dan Zona Integritas.

- d. Indikator keempat adalah persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan, dengan seluruh dokumen dapat diselesaikan tuntas.

Dokumen program dan anggaran yang dihasilkan pada tahun 2015 meliputi dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, laporan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala, laporan keuangan secara berkala, laporan akuntabilitas kinerja, dan dokumen program dan anggaran lainnya yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Sehingga dapat disimpulkan telah tercapai target yang direncanakan yaitu 100%.

- e. Indikator kelima adalah persentase unit kerja yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan, tanpa adanya kegiatan yang tertunda.

Pada tahun 2015 seluruh unit kerja telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagaimana laporan capaian kinerja kegiatan dengan pengukuran kinerja kegiatan yang tertuang dalam lampiran LKj ini pada seluruh unit kerja. Hal ini mencerminkan bahwa efektivitas kinerja pengawasan dan monitoring anggaran telah berjalan dengan baik, seiring dengan penguatan akuntabilitas kinerja menggunakan Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut terkait dengan perencanaan strategik Setjen Wantannas yang masih memerlukan berbagai perbaikan, di antaranya: dokumen PK (Penetapan Kinerja) yang belum terstruktur, kualitas rumusan indikator kinerja belum memenuhi kriteria yang baik, pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya digunakan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja, serta hasil evaluasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja.

Untuk itu, Setjen Wantannas tetap berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, monitoring serta evaluasi anggaran secara berkala agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, utamanya dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. Berbagai upaya tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan rencana aksi pencapaian kinerja sebagai alat monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja;
- 2) Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja, terutama di tingkat unit kerja agar dapat memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik sesuai ketentuan terbaru dalam penyusunannya;
- 3) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk pengendalian dan pemantauan anggaran secara berkala;
- 4) Menyempurnakan sistem monitoring dan evaluasi anggaran dalam rangka analisis pencapaian sasaran strategis dan perbandingan data kinerja kegiatan; dan
- 5) Memanfaatkan informasi kinerja kegiatan dan hasil evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja Setjen Wantannas secara keseluruhan; serta
- 6) Meningkatkan kapasitas SDM pelaksanaan kegiatan melalui pendidikan manajemen kinerja di seluruh jajaran Setjen Wantannas.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, pada tahun 2015 Setjen Wantannas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 144.307.962.000,-. Realisasi anggaran keseluruhan pada 31

Desember 2015 adalah sebesar Rp 140.778.791.636,- atau 97,55% dengan rincian:

- Belanja pegawai Rp 18.321.154.277,- (98,19%)
- Belanja barang/jasa Rp 26.723.518.238,- (95,55%)
- Belanja modal Rp 95.734.119.121,- (98,01%)

Rincian realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 per 31 Desember 2015 yang dilaksanakan pada masing-masing program sebagaimana dijelaskan pada Tabel 12 dan Tabel 13 adalah sebagai berikut:

TABEL 12.
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2015

PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Rp92.403.480.000,-	Rp89.683.169.798,-	97,06
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas	Rp51.904.482.000,-	Rp51.095.621.838,-	98,44
TOTAL	Rp144.307.962.000,-	Rp140.778.791.636,-	97,55

TABEL 13.
KINERJA PROGRAM SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015

NO	PROGRAM	ANGGARAN		OUTPUT KEGIATAN
		PAGU	REALISASI	
1	Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	Rp92.403.480.000,-	Rp89.683.169.798,-	Tersedianya bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan pembinaan ketahanan nasional yang diarahkan kepada bidang pertahanan (<i>defence</i>), keamanan (<i>security</i>), serta pencegahan dan penanggulangan krisis (<i>crisis prevention and resolution</i>), terdiri dari: 1. Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan Sistem Nasional. 2. Terlaksananya penyelenggaraan Pengembangan Sistem Informasi Wantannas

NO	PROGRAM	ANGGARAN		OUTPUT KEGIATAN
		PAGU	REALISASI	
				3. Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan Politik dan Strategi 4. Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan Penginderaan dan Perkiraan Ancaman 5. Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan Evaluasi Implementasi dan Risiko Pembangunan. 6. Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan Perumusan Pertimbangan dan Saran Kebijakan
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp51.904.482.000,-	Rp51.095.621.838,-	Meningkatnya kelancaran pengelolaan dan kecukupan dukungan operasional pelaksanaan tugas Wantannas, yang terdiri melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan persidangan dan humas 3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan rumga, administrasi umum dan administrasi kepegawaian

1. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

Sasaran Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional adalah tersedianya bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan

pembinaan ketahanan nasional yang diarahkan kepada bidang pertahanan (*defence*), keamanan (*security*), serta pencegahan dan penanggulangan krisis (*crisis prevention and resolution*). Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2015 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 92.403.480.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2015 mencapai Rp 89.683.169.798,- (97,06%).

Anggaran Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional ini dikelola oleh 1 (satu) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan kedeputian antara lain:

- a. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan sistem nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
- b. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan peluang, kendala, serta kecenderungan lingkungan strategis dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
- c. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan politik, strategi dan rencana kontijensi dalam rangka menghadapi krisis nasional.
- d. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis dinamika atas pengembangan segenap aspek kehidupan dan pelaksanaan pembangunan serta pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional.

Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional ini, pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen Wantannas tahun 2015 telah sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yakni terlaksananya setiap kegiatan yang dirancang.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas adalah untuk meningkatkan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas, yang pada tahun

2015 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 51.904.482.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2015 mencapai Rp 51.095.621.838,- (98,44%).

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas ini dikelola oleh 1 (satu) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan 1 (satu) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan
- b. Pelayanan persidangan dan humas
- c. Pelayanan pengelolaan Internal perkantoran dan kepegawaian

Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas ini, pencapaian target indikator kinerja utama Setjen Wantannas tahun 2015 telah sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yakni hampir seluruh kegiatan yang direncanakan.

Penjelasan per pos Mata Anggaran dari realisasi anggaran sebagaimana dijelaskan pada Tabel 14 adalah sebagai berikut:

TABEL 14.
REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2015

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
1	Realisasi Pendapatan Negara	-	Rp6.656.564,-	-
	Penerimaan Pajak	-	-	-
	PNBP	-	Rp6.656.564,-	-
	Penerimaan Hibah	-	-	-
2	Realisasi Belanja Negara	Rp144.307.962.000,-	Rp140.778.791.636,-	97,58
	A. Rupiah Murni			
	Belanja Pegawai	Rp18.659.657.000,-	Rp18.321.154.277,-	98,19
	Belanja Barang	Rp27.968.105.000,-	Rp26.720.622.238,-	95,54
	Belanja Modal	Rp97.680.200.000,-	Rp95.737.015.121,-	98,01
	B. Pinjaman dan Hibah			
	Belanja Barang	-	-	-

1. Realisasi Pendapatan Negara
 - Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara Setjen Wantannas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 6.656.564,- yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan jasa giro.

➤ **Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Setjen Wantannas tidak memiliki pagu anggaran PNBPN dari layanan maupun Bendahara Penerimaan, karena itu tidak ada alokasi anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pencatatan PNBPN yang ada di Setjen Wantannas bukan berasal dari hasil penerimaan kas/bendahara penerimaan tetapi merupakan PNBPN yang berasal dari pendapatan jasa giro sebesar Rp 6.656.564,-.

2. Realisasi Belanja Negara

Realisasi belanja negara Setjen Wantannas per 31 Desember 2015 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar Rp 140.778.791.636,- (97,55%) Realisasi belanja Setjen Wantannas mengalami penurunan sebesar 1,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

➤ **Belanja Pegawai**

Pagu Anggaran Belanja Pegawai Setjen Wantannas tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 18.659.657.000,- dengan nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp 18.321.154.277,- atau sebesar 98,19%.

➤ **Belanja Barang**

Pagu Anggaran Belanja Barang Setjen Wantannas tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 27.968.105.000,- dengan nilai realisasi belanja barang sebesar Rp 26.723.518.238,- atau sebesar 95,55%.

➤ **Belanja Modal**

Pagu Anggaran Belanja Modal Setjen Wantannas tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 97.680.200.000,- dengan nilai realisasi belanja modal sebesar Rp 95.734.119.121,- atau sebesar 98,01%.

Dengan demikian, realisasi secara keseluruhan anggaran pada Tahun 2015 tercapai sebesar 97,55%.

BAB IV

P E N U T U P

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Ketahanan Nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dalam mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Setjen Wantannas yang merupakan wujud pertanggungjawaban kepada Presiden RI dan masyarakat (publik).

Sejalan dengan sasaran dan tujuan organisasi Setjen Wantannas yang telah ditetapkan, dan berdasarkan penetapan kinerja tahun 2015 telah terealisasi pencapaiannya dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh realisasi yang dicapai dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja tahun 2015 menjadi bahan untuk terus meningkatkan kualitas pencapaian kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setjen Wantannas dalam rangka menjadi lembaga yang sangat strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran Setjen Wantannas dalam memberikan saran tindak kepada Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional, regional dan global dalam penyusunan perencanaan strategis termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih khas, terukur, realistis, dapat dicapai sesuai jadwal yang ditetapkan SMART (*specific, measurable, achievable, realistic and timebound*)
- 2) Terus melanjutkan program Reformasi Birokrasi dengan fokus dan konsisten pada pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi SDM Setjen Wantannas agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional, regional maupun global sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah

antisipatif dalam memecahkan persoalan ketahanan nasional Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja Setjen Wantannas Tahun 2015, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Republik Indonesia.

Jakarta, Februari 2016

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional

M. Munir
Letnan Jenderal TNI